

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk membantu kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi kegiatan Pedang Saber, KIA, KADOKU E-ktp, ALPABETA dan AJEK sehingga terciptanya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, murah dan transparan.

Manajemen Program Penataan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dijalankan secara keseluruhan, dapat dilihat dari proses manajemen yang dikemukakan oleh William H Newman mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengumpulan Sumber, Pengendalian Kerja dan Pengawasan. Namun dalam menjalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terdapat masalah dan kekurangan dalam menjalankan.

Pada Perencanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program. Yang mana dapat dilihat dari penetapan tujuan yang jelas, jelasnya aktor yang terlibat dalam penetapan tujuan dan tujuan yang tidak menyimpang dari UU yang berlaku. Begitu juga dengan sumber-sumber yang diperlukan sudah terlihat jelas rencana dalam perekrutan

SDM yang terstruktur dan aktor-aktor yang melaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Namun masih kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keliling serta kurangnya dana yang berimbas terhadap kurang meratanya pelayanan yang terjadi di 103 nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi dari segi dari tugas dan fungsi per tim-tim dan perbidang sudah ditentukan masing-masing. Begitu juga halnya dengan menentukan organisasi, metode dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan ini.

Pada Pengorganisasian Program Penataan Administrasi Kependudukan. Pengorganisasian meliputi pengelompokan kegiatan, pendelegasian, kordinasi dan wewenang. Pada proses ini pengelompokan kegiatan telah dilakukan dengan jelas oleh Kepala Dinas. Terlihat dari penentuan kegiatan-kegiatan yang terstruktur yang sesuai dengan tujuan program. penugasan dan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada kepala bidang dan anggota-anggota pelaksana kegiatan, serta kordinasi dan wewenang yang terjadi antara kepala dinas dengan kepala bidang dan anggotanya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan keliling telah ditetapkan secara jelas berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pada indikator Pengumpulan Sumber dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih kekurangan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, ketersediaan peralatan khusus, material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi kependudukan. Hal ini terlihat dari belum adanya bus khusus pribadi, kurangnya sumber daya manusia di operator SIAK dan anggaran untuk biaya pelaksanaan

kegiatan pelayanan keliling di 103 nagari yang ada di seluruh Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini berdampak pada terhambatnya pelayanan administrasi secara merata di 103 nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Pada indikator Pengendalian Kerja pada Program Penataan Administrasi Kependudukan telah dilakukan pengendalian kerja seperti pelatihan pelatihan mulai pelatihan tenaga pengelola SIAK di 12 kecamatan, pelatihan pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan. Sehingga dalam pelaksanaan program penataan administrasi kependudukan para pegawai sudah mampu dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik. Namun dari segi sumber daya manusia masih terdapat kekurangan tenaga kerja yaitu 5 tenaga kerja yang terdapat di 5 operator SIAK Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.

Pada indikator Pengawasan dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan kegiatan-kegiatan. Pengawasan sudah dilakukan oleh Kepala Dinas dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan kegiatannya melalui pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan ke lapangan dengan cara mengunjungi langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara tiba-tiba sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk laporan-laporan yang diterima oleh tim-tim pelaksana kegiatan. Namun masih terkendala laporan-laporan yang kurang lancar di terima oleh kepala dinas di karenakan laporan tersebut telah terinput di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Hal itu lah yang menjadi alasan tim jarang memberikan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan.

Dapat disimpulkan bahwa proses manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja serta pengawasan sudah berjalan dengan baik terbukti dari perolehan penghargaan yang di dapat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 oleh Gubernur Sumatera Barat atas inovasi pelayanan dan manajemen yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengembangan pelayanan dan perbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah harus meningkatkan anggaran APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk pengembangan dan pengelolaan seperti sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan sehingga proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terlaksana lebih baik lagi.
2. Diharapkan DUKCAPIL bisa bekerjasama dengan pihak ke ketiga untuk membatu menambah anggaran program dalam penyediaan bus khusus pelayanan sebab dengan banyaknya nagari dan korong di Kabupaten Padang Pariaman tidak akan cukup dengan 1 bus saja.
3. Penelitian yang dilakukan peneliti masih memiliki keterbatasan. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti Program Penataan Administrasi Kependudukan

disarankan menggunakan teori manajemen lain sehingga peran pihak ketiga lebih dapat terlihat secara detail dan baik.

Untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan pedoman dan memperkaya bahan kepustakaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik tentang Manajemen Program Penataan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil di Kabupaten Padang Pariaman.

